

JUDUL : PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA
PERSEKUTUAN KOMANDITER DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK - POKOK AGRARIA

Nama: Michael Thedy Litmantoro

Jurusan/ Program Studi: Fakultas Hukum

Pembimbing:

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pada pertengahan tahun 2019 dikeluarkan Surat Edaran yang dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari aturan yang telah ada. Bahwa dalam SE Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor: 2/SE-HT/02.01/VI/2019, berisikan kebijakan mengenai pemberian HGB kepada CV. Perlu diketahui dalam Pasal 36 UUPA yang berhak memperoleh HGB hanyalah orang dan Badan Hukum, sementara CV bukanlah orang dan bukan badan hukum, sehingga perlu mendapat perhatian mengenai dikeluarkannya SE tersebut bila dikaitkan dengan pengaturan yang ada dalam UUPA. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini apakah pemberian HGB kepada CV telah sesuai dengan UUPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan dari aspek peraturan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini. Pembahasan permasalahan mengenai pendaftaran CV bisa mendapatkan HGB dan mendapat kesimpulan bahwa SE tersebut sesuai dengan UUPA dikarenakan bukan CV yang diberikan HGB melainkan tetap menggunakan atas nama sekutu, sehingga tidak bertentangan dengan UUPA itu sendiri. Namun hal ini akan mendapatkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai keberadaan SE tersebut yang dirasa menimbulkan ketidakpastian hukum terlebih atas pemberian hak atas tanah kepada CV.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, CV, UUPA

TITLE : PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PERSEKUTUAN
KOMANDITER DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG POKOK - POKOK AGRARIA

Name: Michael Thedy Litmantoro

Dicipline/ Study Programme: Faculty of Law

Contributor:

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

In mid-2019, a Circular Letter was issued which was intended to be the implementing rule of the existing regulations. Whereas in the SE Ministerial Agrarian and Spatial Planning Number: 2/SE-HT/02.01/VI/2019, it contains a policy regarding the granting of HGB to CV. Need to know in chapter 36 of the UUPA that only individuals and legal entities are entitled to HGB, while a CV is not a person and is not a legal entity, so it is necessary to pay attention to the issuance of the SE when it is associated with the existing regulations in the UUPA. This will create legal uncertainty. The problem in this study is whether the granting of HGB to CV is in accordance with the UUPA. This study uses a normative juridical research method with an approach from the aspect of legislation and a legal concept approach associated with existing problems. Using primary and secondary legal materials in this study. Discussion of the problem regarding the registration of CVs to obtain HGB and concluded that the SE was in accordance with the UUPA because it was not the CV that was given to the HGB but still using it on behalf of the partners, so it did not conflict with the UUPA itself. However, this will have many problems in its implementation so it is necessary to pay further attention to the existence of the SE which is felt to cause legal uncertainty, especially regarding the granting of land rights to CV.

Keywords: Building use Right, CV, UUPA